

Taktik 'Pump and Dump' Trump: Tunda Tarif

Sri Mulyani Sebut Indonesia Harus Terus Waspada

Kabar baik yang mengejutkan meski semu. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menunda penerapan tarif resiprokal bagi mayoritas negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Hanya China yang makin ditekan menjadi 125 persen. Trump yang awalnya ngotot meski mendapat serangan dari banyak negara, akhirnya menurunkan tarif impor dari sebagian besar mitra dagang AS menjadi 10 persen selama 90 hari. Dia mengumumkan jeda ini beberapa jam sebelum 90 negara diwajibkan membayar tarif impor baru yang lebih tinggi. Alasan Trump menunda kebijakannya itu adalah untuk memberikan waktu bagi negosiasi perdagangan dengan negara-negara tersebut. Dia bersikukuh penundaan muncul karena melihat pelaku pasar mulai 'takut' dan bertindak di luar kendali. Keputusan ini kembali membuat geger dunia. Sejumlah analis dan politisi menilai langkah Trump adalah manipulasi pasar yaitu sebagai strategi 'pump and dump' terbalik. Trump sengaja menjatuhkan harga saham lalu membeli sebelum harga naik kembali. Muncul pertanyaan, siapa yang diuntungkan? Miliarder mana yang baru saja menjadi lebih kaya? Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Indonesia tetap waspada. Pemerintah akan menggunakan jeda 90 hari menganggap hal itu merupakan kesempatan untuk membahas dan mencerna solusi terbaik. Serta mengurangi risiko tarif terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Hal 11....

DAFTAR 56 NEGARA DAN KAWASAN YANG DAPAT PENUNDAAN TARIF RESIPROKAL OLEH AS

- Aljazair 30%
- Angola 32%
- Bangladesh 37%
- Bosnia dan Herzegovina 35%
- Botswana 37%
- Brunei Darussalam 24%
- Kamboja 49%
- Kamerun 11%
- Chad 13%
- Pantai Gading 21%
- Republik Demokratik Kongo 11%
- Equatorial Guinea 13%
- Uni Eropa 20%
- Kepulauan Falkland 41%
- Fiji 32%
- Guyana 38%
- India 26%
- **Indonesia 32%**
- Irak 39%
- Israel 17%
- Jepang 24%
- Yordania 20%
- Kazakhstan 27%
- Laos 48%
- Lesotho 50%
- Libya 31%
- Liechtenstein 37%
- Madagaskar 47%
- Malawi 17%
- Malaysia 24%
- Lesotho 50%
- Libya 31%
- Liechtenstein 37%
- Makedonia Utara 33%
- Norwegia 15%
- Pakistan 29%
- Filipina 17%
- Serbia 37%
- Afrika Selatan 30%
- Korea Selatan 25%
- Sri Lanka 44%
- Swiss 31%
- Suriah 41%
- Taiwan 32%
- Thailand 36%
- Tunisia 28%
- Vanuatu 22%
- Venezuela 15%
- Vietnam 46%
- Zambia 17%
- Zimbabwe 18%

KRONOLOGI TARIF AS UNTUK CHINA, DARI 34% SAMPAI 125%

Rabu, 2 April 2025

Trump umumkan tarif dasar minimal 10% untuk hampir semua impor ke AS. Tarif resiprokal tinggi diberlakukan terhadap negara dengan defisit dagang besar. Tarif 34% dikenakan untuk produk dari China.

Jumat, 4 April 2025

China balas dengan tarif 34% atas produk AS. Tarif mulai berlaku Kamis, 10 April 2025, berdasarkan hukum domestik dan internasional.

Senin, 7 April 2025

Trump ancam tarif tambahan 50% jika China tak mencabut tarifnya. Total tarif untuk China naik jadi 104% (gabungan 20% lama + 34% + 50%).

Rabu, 9 April 2025

China naikkan tarif jadi 84% untuk produk AS. Trump langsung membalas dengan menaikkan tarif jadi 125% atas produk China.



RATUSAN ribu orang berdemonstrasi di puluhan kota Amerika Serikat dan Eropa, memprotes kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump termasuk pemberlakuan atarif timbal balik, penutupan sejumlah badan federal, dan deportasi imigran. (ist.afp)

Tsunami Ekonomi Itu Bernama 'Jor-joran' Impor

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak bisa berubah menjadi momok menakutkan. Bila pelaku usaha jor-joran (berlomba banyak-banyakan, Red) mendatangkan barang dari luar negeri, maka daya saing produk lokal akan tekor. Walhasil, petani, nelayan hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) potensi gulung tikar. Di sisi lain, konsumen kelas menengah ke bawah mungkin akan menikmati harga murah dalam jangka pendek karena keran impor dibuka selebar-lebarnya. Namun akan menjadi malapetaka ketika harga impor melonjak akibat krisis global, saat produksi lokal sudah terlanjur mati. Negara harus hadir melalui proteksi yang terukur terutama terhadap komoditas pangan strategis seperti beras, kedelai, dan gula serta industri padat karya yang menopang jutaan lapangan kerja. Logika sederhananya, tsunami barang impor akan mengguncang pasar Indonesia. Buntutnya, produk lokal tak laku, industri ogah bangun pabrik di dalam negeri, lapangan pekerjaan jadi terbatas dan ekonomi Indonesia pun bakal terperosok ke jurang krisis. Jangan gegabah, pesan para ekonom kepada pemerintah.

EKONOM Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan penghapusan kuota impor secara menyeluruh bukanlah kebijakan tanpa konsekuensi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih berjuang membangun kemandirian industrinya.

Jika diterapkan tanpa strategi pendukung yang matang, langkah ini justru berisiko menggulung sektor produksi dalam negeri, memperdalam ketergantungan terhadap barang asing, serta menggagalkan agenda besar seperti swasembada pangan.

Syafruddin mengatakan penghapusan kuota impor secara tiba-tiba dan tanpa strategi pendukung yang matang akan membawa dampak serius bagi banyak kelompok, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja sektor riil.

"Industri kecil dan menengah yang belum siap bersaing akan terpukul, petani kehilangan pasar, dan lapangan kerja terancam hilang. Lebih dari itu, pembukaan impor tanpa kendali dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan melemahkan nilai tukar, sekaligus menciptakan keresahan sosial akibat naiknya angka pengangguran," katanya.

Di sisi lain, konsumen kelas menengah ke bawah mungkin akan menikmati harga murah dalam jangka pendek dengan dibukanya keran impor selebar-lebarnya. Namun akan menjadi malapetaka ketika harga impor melonjak akibat krisis global, tetap produksi lokal sudah terlanjur mati.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak menghapus kuota impor secara gegabah. Dalam merancang kebijakan perdagangan, sambungnya, pemerintah harus mampu membedakan mana produk yang layak dibuka impornya secara bebas dan mana yang perlu dilindungi secara ketat demi kepentingan nasional.

Menurutnya, produk-produk konsumsi non-strategis, teknologi tinggi yang belum tersedia di dalam negeri, serta bahan baku untuk industri ekspor dapat diimpor lebih leluasa karena mendukung efisiensi dan daya saing.

Namun, untuk komoditas pangan strategis seperti beras, kedelai, dan gula, serta produk UMKM dan industri padat karya yang menopang jutaan lapangan kerja, negara harus hadir melalui proteksi yang terukur.

"Kebijakan impor harus dirancang



Penghentian impor komoditas pangan, termasuk gula untuk mencapai target swasembada sempat digaungkan. Tapi kini Presiden Prabowo meminta keran impor dibuka selebar-lebarnya. (Dok.ist)

bukan atas dasar tekanan dagang atau logika harga murah semata, tetapi atas dasar strategi pembangunan jangka panjang yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat," katanya.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan langkah penghapusan kuota impor justru berisiko besar mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang super ketat.

Menurutnya, jika tidak dikontrol maka sama saja mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.

"Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan pelambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita

malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal," tegas Andry.

Andry mengatakan jika keran impor dibuka bebas, maka yang paling terpukul adalah industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan yang saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Imbasnya, PHK massal bisa makin tidak terhindarkan.

Jika PHK yang sudah besar makin meluas, ujungnya daya beli masyarakat ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan. Tanpa daya beli, konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian nasional akan ikut melemah.

Tak hanya itu, keran impor yang bebas juga turut berdampak buruk pada iklim investasi.

"Kalau pasar domestik dibanjiri

PERKEMBANGAN IMPOR FEBRUARI 2025

FEBRUARI 2024

Barang Konsumsi	1.861,9
Barang Modal	3.274,9
Bahan Baku/Penolong	13.303,4
TOTAL	18.440,2

FEBRUARI 2025

Barang Konsumsi	1.470,0
Barang Modal	3.454,3
Bahan Baku/Penolong	13.940,0
TOTAL	18.864,3

↑ 2.30% Dibandingkan Impor 2024

Wamentan Pastikan Tak Rugikan Industri Lokal

WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan bahwa kebijakan penghapusan kuota komoditas impor tidak akan merugikan industri dalam negeri.

Sudaryono mengatakan Indonesia masih memiliki fokus utama untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Kuota impor yang akan dihapus hanya terbatas pada sektor tertentu.

"Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil," kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Sudaryono menjelaskan kuota impor yang ada saat ini dianggap kurang efisien karena memiliki rantai yang panjang.

Lebih lanjut, kata Sudaryono, ke depannya pelaku usaha bisa langsung mengajukan izin untuk impor baik ke Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan.

Ia juga menegaskan produksi dalam negeri tetap harus diutamakan dan dilindungi. Menurutnya, penghapusan kuota impor bukan berarti semua orang bebas membeli barang dari luar negeri.

"Kita kan melindungi yang di dalam negeri, itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-luasnya, kemudian industri yang di

dalam negeri mati, nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, penghapusan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara seimbang, baik hulu malun hilir.

Pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan di dalam negeri jika keran impor dibuka. "Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa sih kebutuhan (dalam negeri)," katanya dikutip Kamis (10/4/2025). (wid, ant/dya)

DPR Tunggu Surat Presiden soal RUU Polri, Kopolnas Sebut Ditunda

DPR hingga kini masih menunggu surat presiden untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian RI atau RUU Polri. Namun menurut Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) menyebut ditunda karena akan fokus lebih dahulu pada RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

MASYARAKAT waswas menanti pembahasan RUU Polri. Namun, menurut anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas, menyebut pemerintah Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan draft revisi UU Polri versi pemerintah.

Akibatnya, hingga hari ini Ilyas mengklaim tidak tahu persis bagaimana kebijakan pemerintah terhadap UU Polri. "Apakah ada perubahan atau tetap seperti yang sekarang ini," ujarnya Kamis (10/4/2025).

Diketahui, perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 itu merupakan inisiatif DPR sejak 2024. "Kami di parlemen saat ini masih menunggu supres dari Presiden untuk membahas bersama pemerintah," kata Ilyas.

Dia mengatakan, DPR masih akan terus memantau bagaimana sikap dan pernyataan resmi pemerintah terhadap revisi UU yang telah berlaku selama 23 tahun itu.

Termasuk wewenang Polri perlu ada perubahan atau tidak, nanti akan kita ketahui dari sikap pemerintah terhadap revisi UU Polri yg diusulkan DPR," kata Ilyas. Ini bukan pertama kalinya anggota dewan mengatakan bahwa legislator belum mendapat Surpres untuk membahas RUU Polri.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa mereka belum menjadwalkan pembahasan RUU Polri. Puan juga menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah mengesahkan revisi UU TNI. Puan menegaskan, apabila ada surpres yang beredar di publik, itu bukan surpres resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini bukan draf resmi karena pimpinan DPR belum menerima surpres RUU tersebut. "Jadi, kalau sudah ada DIM yang beredar, itu bukan DIM resmi," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta



Aparat Kepolisian membubarkan paksa dan memukul mundur massa yang melakukan aksi demo Kamis, 27 Maret 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. (dok.ist)

Pusat, Selasa, 25 Maret 2025.

Adapun RUU Polri disorot karena beberapa pasal yang diusulkan untuk diganti. Berdasarkan draf RUU Polri yang beredar, Pasal 16 ayat 1 huruf q menyatakan Polri berwenang melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai, intervensi polisi dalam membatasi ruang siber berpotensi mengecilkan ruang berpendapat yang dimiliki publik. Selain itu, kewenangan Polri dalam penindakan di ruang siber ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Badan Sandi dan Siber Negara.

Usulan perubahan yang menuai polemik dalam draf RUU Polri juga terdapat dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g. Pasal itu menyatakan, Polri bertugas untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan melakukan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oeh UU, dan bentuk pengamanan swakarsa.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, usulan perubahan pasal ini justru mendekatkan peran Polri sebagai superboby investigator. Tugas pembinaan terhadap pasukan pengamanan swakarsa yang dimiliki Polri juga perlu dievaluasi. Sebab, Koalisi Masyarakat Sipil menilai, tugas itu berpotensi memunculkan pelanggaran HAM maupun ruang bagi "bisnis keamanan".

Pasal lain yang menjadi polemik dalam draf RUU Polri yaitu pasal 16 A. Ini mengatur tentang kewenangan Polri menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang, usulan itu membuat kewenangan Intelkam yang dimiliki Polri melebihi lembaga lain yang mengurus soal intelijen. Lewat usulan pasal ini, Polri diduga punya kewenangan untuk menagih data intelijen dari lembaga-lembaga seperti BSSN hingga Badan Intelijen Strategis TNI.

Di sisi lain, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) menyebut bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia atau RUU Polri sementara waktu ditunda. Informasi penundaan tersebut disampaikan oleh Ketua Harian Kopolnas Arief Wicaksono Sudiutomo yang berkomunikasi langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (9/4/2025).

"Sekarang untuk pembahasan RUU Polri itu lagi di hold. Di Polri lagi fokus kepada pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)," kata Arief Kamis (10/4/2025).

Menurut Arief, Polri ingin menunggu pembahasan RUU KUHAP selesai baru beralih ke RUU Polri.

Arief mengatakan beberapa klausul di hukum acara pidana belum dirincikan dalam UU Polri. Misalnya, aturan penahanan tersangka yang

○○○

PASAL-PASAL KONTROVERSIAL BERDASARKAN DRAF RUU DAN KAJIAN SIPIL

- 1. Pengawasan Ruang Siber (Pasal 14 Ayat 1 Huruf b dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf q)**
RUU memberi kewenangan Polri untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengamanan ruang siber, termasuk "penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber". Hal ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan diperkuat oleh Pasal 16 ayat (1) huruf q. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan kebebasan berekspresi dan privasi warga di ranah digital.
- 2. Penggalangan Intelijen oleh Polri (Pasal 16A dan 16B)**
Pasal 16A memberikan Polri kewenangan melakukan penggalangan intelijen, yaitu "tindakan untuk mempengaruhi sasaran dengan tujuan merubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan". Ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang, terutama tanpa definisi jelas atas "kepentingan nasional". Menurut Pasal 16B, Intelkam Polri juga berwenang memeriksa aliran dana dan meminta bahan keterangan dari kementerian dan lembaga lain. Pengaturan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga seperti BIN dan PPTAK.
- 3. Kewenangan Penayadapan Tanpa Izin (Pasal 14 Ayat 1 Huruf o)**
RUU memberikan kewenangan penayadapan kepada Polri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf o. Namun, tidak ada mekanisme perizinan yang diatur secara eksplisit. Ini berbeda dengan KPK yang wajib meminta izin dari Dewan Pengawas.
- 4. Intervensi terhadap Penyidikan Lembaga Lain (Pasal 14 Ayat 1 Huruf d dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf n, o, dan p)**
Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g diberi kewenangan membina teknis PPNS dan penyidik lembaga lain, seperti KPK. Sementara dalam Pasal 16 ayat (1) huruf hingga p, Polri berhak memberi rekomendasi pengangkatan penyidik, memberi petunjuk penyidikan, dan menerima hasil penyidikan dari lembaga lain.
- 5. Penguatan Pam Swakarsa (Pasal 14 Ayat 1 Huruf g)**
Pasal 14 ayat (1) huruf g juga mengatur bahwa Polri membina bentuk pengamanan swakarsa. "Undang-Undang ini diatur bahwa Polri secara fungsional dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi," demikian kutipan penjelasan RUU Polri.
- 6. Perpanjangan Usia Pensiun (Pasal 30 Ayat 2 dan 3)**
Pasal 30 ayat (2) menetapkan batas usia pensiun Anggota Polri menjadi 60 tahun, dan ayat (3) memperpanjangnya hingga 62 tahun bagi yang memiliki keahlian khusus. Untuk pejabat fungsional, usia pensiun bahkan bisa sampai 65 tahun.
- 7. Kewenangan Membina Hukum Nasional dan Smart City (Pasal 14 Ayat 1 Huruf e dan Ayat 2 Huruf c)**
Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, Polri diberi tugas "turut serta dalam pembinaan hukum nasional" yang berpotensi tumpang tindih dengan tugas BPHN. Sementara itu, Pasal 14 ayat (2) huruf c memberi kewenangan Polri untuk menyelenggarakan smart city bersama pemerintah pusat dan daerah.
- 8. Minimnya Mekanisme Pengawasan**
RUU Polri tidak secara tegas memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian. Dalam Pasal 35 hingga Pasal 39, peran Komisi Kode Etik dan Kopolnas disebut namun tetap diatur lewat Peraturan Presiden atau Peraturan Kepolisian.

dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP yang aturan teknisnya belum ada di UU Polri. Beleid itu mengatur bahwa seorang tersangka bisa ditahan bila ancaman hukuman penjaranya di atas 5 tahun atau bisa kurang dengan catatan lain.

Seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. "Nah (aturan) itu tidak ada di UU Polri," ucap Arief. Bila pembahasan RUU Polri dilanjutkan tanpa menunggu RUU KUHAP selesai, Arief menilai akan timbul kebingungan akibat ketidaksinkronan.(wid, tmo, rls/dya)

Kasus Pagar Laut Bekasi

9 Tersangka Ditetapkan, Mayoritas Perangkat Desa

Bareskrim Polri menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi pagar laut di Bekasi, mayoritas merupakan perangkat Desa Segarajaya. Kasus ini bermula dari laporan dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Keuntungan hingga miliaran rupiah diraup.

KASUS dugaan korupsi pembangunan pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat, memasuki babak baru. Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan orang tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi.

Para tersangka, mayoritas merupakan perangkat Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen terkait proyek tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya kegagalan dalam proses perizinan dan pembangunan pagar laut di Bekasi.

Sembilan tersangka yang telah ditetapkan Bareskrim Polri terdiri dari unsur perangkat Desa Segarajaya dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka adalah MS (mantan Kepala Desa Segarajaya), AR (Kepala Desa Segarajaya periode 2023-sekarang), GM (Kasi Pemerintahan Desa Segarajaya), serta Y dan S (Staf Desa Segarajaya).

Selanjutnya empat orang dari unsur BPN, yakni AP (Ketua Tim Support PTSL/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), GG (petugas ukur Tim Support), MJ (operator komputer), dan HS (tenaga pembantu Tim Support PTSL).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa MS cs dikenakan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56. Sementara Tim Support PTSL dikenakan Pasal 26 ayat 1 KUHP.

Djuhandani menyebut, Kepala Desa Segarajaya, Abdul Rosyid (AR) diduga menjual lokasi bidang tanah di laut. "Yang bersangkutan (AR) menjual lokasi bidang tanah di laut kepada saudara YS dan BL," jelas Djuhandani, Kamis (10/4/2025).

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat atas nama Martin Sulaiman terhadap Yanto dan kawan-kawan. Penyidik telah memeriksa kurang lebih 40 saksi dan menemukan bukti-bukti terkait modus operandi para tersangka.

Modus yang digunakan adalah pemalsuan sertifikat, baik objek maupun subjeknya. "Modus mengubah sertifikat, baik objek maupun subjek dari sertifikat tersebut," ungkap Brigjen Djuhandani.

Kades Segarajaya, Abdul Rosyid telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pagar laut Bekasi ini pada 20



Pembongkaran pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (dok)

Februari 2025 lalu.

Rosyid mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pemalsuan SHGB tersebut karena baru menjabat sejak 14 Agustus 2023. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemagaran laut telah terjadi sejak tahun 2022.

Penyidik telah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk dokumen-dokumen yang dibawa oleh Abdul

Rosyid saat diperiksa. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa kurang lebih 40 orang saksi untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Langkah selanjutnya adalah penyidik akan melakukan upaya paksa berupa pemanggilan terhadap para tersangka, serta pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

"Selanjutnya, penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa

yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan, dan lain sebagainya, dalam secepatnya agar segera dapat kita berkas dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU," tegas Djuhandani. (wid, put, ist, rls/dya)

Para Tersangka Pagar Laut Bekasi

- MS (mantan Kepala Desa Segarajaya),
- AR (Kepala Desa Segarajaya periode 2023-sekarang),
- GM (Kasi Pemerintahan Desa Segarajaya)
- Y dan S (Staf Desa Segarajaya).
- AP (Ketua Tim Support PTSL/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),
- GG (petugas ukur Tim Support),
- MJ (operator komputer)
- HS (tenaga pembantu Tim Support PTSL).

Sumber: Bareskrim Polri

Di Tangerang, Negara Diklaim Tak Rugi

POLRI melimpahkan kembali berkas perkara empat tersangka kasus pemalsuan surat, untuk penerbitan 260 sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB), di wilayah pagar laut Tangerang ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Berkas itu dikirim kembali tanpa adanya tambahan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) sesuai petunjuk jaksa.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya langsung mempelajari setelah berkas perkara dikembalikan jaksa penuntut umum (JPU). Setelah mempelajari, penyidik meminta keterangan beberapa ahli, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari teman-teman BPK, kita diskusikan kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya. Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara," kata Djuhandani di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Kemudian, dari keterangan beberapa ahli, Djuhandani mengaku juga mencoba mendiskusikan untuk melihat kasus tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi

atau tidak. Di sisi lain, Djuhandani mengatakan petunjuk jaksa dicocokkan dengan Putusan MK No.25/PUU 14-2016, tanggal 25 Januari 2017.

Ia menjelaskan dalam putusan MK menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata, sehingga dapat konsekuensi hukum. Dihilangnya kata dapat dalam frase dapat merugikan kerugian negara di Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

"Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU," ungkap Djuhandani. Djuhandani melanjutkan, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit, menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar Undang-

Undang tindak pidana korupsi atau melanggar Undang-Undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

"Kemudian yang ketiga, terdapatnya indikasi pemberian suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini yang dalam hal ini Kades Kohod, ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kortas Tipidkor Mabes Polri," terang jenderal polisi bintang satu itu.

Selanjutnya, Djuhandani menyebut terhadap kejahatan atas kekayaan negara yang berupa pemagaran wilayah laut Desa Kohod, saat ini tengah diselidiki oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Bahkan telah terbit surat perintah penyelidikan.

Kemudian, bila melihat sesuai asas lex consumer derogate legi consume, kata Djuhandani, aturan yang digunakan berdasarkan fakta-fakta yang dominan dalam sebuah perkara. Sehingga, melihat posisi kasus pagar laut Tangerang, fakta yang dominan adalah pemalsuan dokumen. (kum, wid, rls/dya)

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Komnas HAM: Polisi, Dokter, hingga Guru Besar Harus Dihukum Berat

Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyatakan terbuka dalam bekerja sama dengan beragam pihak, khususnya dalam mencegah terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di tanah air. Beberapa waktu terakhir polisi hingga guru besar menjadi pelaku. Terbaru, dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) memerkosa pasien dan penunggu pasien.

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar polisi, dokter, hingga guru besar pelaku kekerasan seksual dihukum berat. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah usai menerima audiensi Forum Perempuan Anak Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melaporkan kasus kekerasan seksual eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Dokter, guru besar, kemudian polisi, jadi para pihak itu mesti diberikan pemberatan hukuman, karena status pelaku yang seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," kata Anis kepada awak media di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Anis lantas menyinggung kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Edy Meiyanto terhadap sejumlah mahasiswanya. Selain itu, ia juga menyoroti kasus pemerkosaan yang dilakukan residen anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

Menurut Anis, polisi, dokter, hingga tenaga pendidik seharusnya melayani dan melindungi masyarakat. Namun, tindakan para pelaku sangat bertolak belakang. "Karena posisi mereka itu kan kalau di dalam undang-undang TPKS itu disebut sebagai pihak yang seharusnya itu memberikan perlindungan dan pelayanan," sambungnya.

Anis pun meminta seluruh pihak ikut mengawal kasus-kasus tersebut maupun kasus kekerasan seksual lainnya. "Jadi proses hukum bagi pelaku saya kira sangat penting. Kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya," jelas Anis.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi telah mengatakan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Kita menyatakan darurat kekerasan seksual untuk perempuan dan anak," kata Arifah Fauzi.

Arifah lalu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Koordinasi, sinergi. Karena kami tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tangan (kewenangan) kami terbatas, anggaran kami terbatas. Tapi dengan adanya kesadaran, kemauan untuk menyelesaikan bersama-sama," katanya.

(Ilustrasi) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut Indonesia saat ini dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.(dok)



Diketahui, Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang, mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani kasus pidana umum yang menyeret eks Kapolres Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Daniel menyebutkan bahwa berkas perkara kasus kekerasan seksual dan

pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap tiga orang anak di Kota Kupang telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Untuk kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual, berkas perkaranya sudah berjalan tahap satu," kata Daniel.(wid, tmo, ist, ant/dya)

Korban Ada 3 Orang, Kemenkes Bekukan PPDS Anestesi RSHS Bandung



Polda Jabar saat menghadirkan tersangka berinisial PAP atas kasus kekerasan seksual yang terjadi pada keluarga pasien di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025).(ant.dok)

JUMLAH korban pemerkosaan oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bertambah menjadi tiga orang. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan.

Surawan menjelaskan korban lainnya dari mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad ini adalah pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut dan melaporkan perbuatan dokter Priguna Anugerah (31) melalui hotline Polda Jabar. "Ada dua korban [baru], [menghubungi polisi] melalui hotline.

Dua korban ini bersangkutan pasien, peristiwa berbeda dengan yang kami tangani," kata Surawan, Kamis (10/4/2025).

Menurutnya, modus tersangka dalam menjalankan aksi kejahatannya serupa dengan korban

pertama, yakni dengan mengambil sampel darah dan korban dibius. "Rata-rata modusnya sampai dalih [yaitu] mengambil sampel darah, DNA, dan dibius pemerkosaan pada korban," ujarnya.

Dia mengatakan sejauh ini pihaknya baru memeriksa satu orang pelaku pemerkosaan, yakni Priguna Anugerah Pratama, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FKUnpad).

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menginstruksikan penghentian sementara kegiatan residensi residensi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

"Kemenkes juga sudah menginstruksikan kepada Dirut RSUP Hasan Sadikin untuk menghentikan sementara waktu, selama 1 bulan, kegiatan residensi Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP Hasan Sadikin untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan pengawasan serta tata kelola bersama FK Unpad," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman dalam keterangan resmi.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah meminta kepada Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dokter berinisial PAP tersebut.

"Pencabutan STR akan otomatis membatalkan Surat Izin Praktik (SIP) dr PAP," tambahnya.

Aji mengungkapkan keprihatinan dan menyesalkan adanya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dr PAP.

Diketahui, kasus ini terjadi pada pertengahan Maret 2025 lalu, namun baru viral dibicarakan di media sosial setelah diungkapkan oleh akun Instagram @ppdsgramm, 8 April 2025.(wid, rls, ant/dya)

Kabupaten Malang Diguncang 164 Bencana Sepanjang Triwulan Pertama 2025

Salah satu kejadian bencana longsor di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. (dok. Pusdalops BPBD Kab Malang)



MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat sebanyak 164 kejadian bencana terjadi sepanjang triwulan pertama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, gempa bumi menjadi bencana yang paling dominan terjadi.

Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, berbagai jenis bencana yang tercatat meliputi angin puting beliung, banjir, gempa bumi, pohon tumbang, hingga tanah

longsor. Catatan ini dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Malang.

"Bencana yang paling banyak terjadi sejak Januari hingga Maret 2025 adalah gempa bumi, dengan total 66 kejadian. Diikuti dengan tanah longsor sebanyak 42 kejadian," ujar Sadono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/4/2025).

Selain gempa bumi dan longsor,

BPBD juga mencatat 25 kejadian angin puting beliung, 23 kejadian pohon tumbang, serta 8 kejadian banjir. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, Sadono menyebut ada delapan warga yang dilaporkan mengalami luka-luka akibat terdampak berbagai kejadian bencana tersebut.

Lebih lanjut, dari sisi dampak infrastruktur, Sadono menyebutkan setidaknya 130 fasilitas mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Adapun rinciannya, yakni 109 unit mengalami rusak ringan, 14 unit rusak sedang, dan 7 unit lainnya mengalami kerusakan berat.

"Kerusakan meliputi jembatan, jalan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, hingga jaringan listrik. Kerusakan berat paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, ada 5 di sana," paparnya.

Adapun pemetaan kejadian bencana terbanyak tercatat di Kecamatan Pujon dengan 12 kejadian, disusul Singosari sebanyak 10 kejadian. Sementara itu, sambungnya, kecamatan Lawang, Poncokusumo, dan Tirtoyudo masing-masing tercatat sebanyak enam kejadian. Beberapa

kecamatan lain seperti Kasembon, Ngantang, Wagir, Pakis, dan Kapanjen masing-masing mengalami lima kejadian bencana.

"Kecamatan lainnya tercatat mengalami satu hingga empat kejadian. Sementara itu, hingga akhir Maret, belum terdapat laporan kejadian bencana di wilayah Kecamatan Gedangan, Kromengan, Pagelaran, Tajinan, dan Wajak," jelas Sadono.

Dalam kesempatannya ini, Sadono juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, mengingat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem pada beberapa pekan ke depan.

Selain itu, BPBD Kabupaten Malang juga memperpanjang status Siaga Bencana Hidrometeorologi hingga akhir bulan April 2025 ini.

"Berdasarkan rilis BMKG, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi hujan lebat dan angin kencang hingga pekan depan. Kami juga terus berkoordinasi dengan tim reaksi cepat serta pihak terkait untuk melakukan identifikasi, penilaian dampak, pembersihan, hingga distribusi logistik darurat," katanya. (Santi/Dya)

Urai Kemacetan di Jalan Bandung, Pemkot Malang dan Kemenag Bakal Pecah Aktivitas 3 Madrasah

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggagas pemecahan aktivitas 3 madrasah negeri yang berada di kawasan Jalan Bandung. Langkah yang dikoordinasikan bersama Kemenag Kota Malang ini, diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan tersebut, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan keberadaan tiga madrasah, yakni Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, cukup menjadi pemicu kemacetan di Jalan Bandung. Ketiga institusi pendidikan tersebut saat ini berada dalam satu kawasan dan memiliki jumlah siswa yang cukup besar.

"Saya sudah koordinasi dengan Kemenag Kota Malang. Di samping itu, kami juga sudah punya forum lalu lintas yang membahas upaya mengurangi kemacetan," ujar Wahyu, Kamis (10/4/2025).

Dari hasil koordinasi, Wahyu menyebutkan muncul wacana untuk membagi aktivitas pendidikan di tiga madrasah itu ke dalam dua lokasi berbeda. Dengan konsep membentuk

dua kampus, yakni kampus 1 yang tetap berada di Jalan Bandung, dan kampus 2 yang akan dibangun di kawasan Islamic Center, Kecamatan Kedungkandang. "Jadi MIN, MTsN, dan MAN di sana tetap, tetapi akan dipecah, ada kampus 1 dan 2. Istilahnya itu. Jadi kampus 1 ada tetap di Jalan Bandung, kampus 2 ada di sekitar kawasan Islamic Center," jelasnya.

Menurut Wahyu, lahan untuk pembangunan kampus kedua akan disediakan oleh Pemkot Malang. Sementara pembangunan fisik akan menjadi tanggung jawab dari Kantor Kemenag Kota Malang. Lebih lanjut, dikatakannya kawasan Islamic Center dipilih karena telah dirancang sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan baru di wilayah timur kota.

"Karena di Islamic Center itu kan sudah ada beberapa instansi yang akan kami pindahkan di sana, ada Kantor Polsek, ada Satpol, ada Imigrasi. Jadi nanti akan menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan juga," ungkapnya.

Saat ini, menurutnya tahapan yang sedang berjalan adalah penyusunan siteplan atau rencana tapak kawasan Islamic Center. Wahyu menyebutkan,



Kemacetan di Jalan Bandung, Kota Malang. (Santi/Lentera)

Pemkot Malang memiliki sekitar delapan hektare lahan di kawasan tersebut yang siap dimanfaatkan untuk mendukung rencana ini.

"Di sana sudah ada Islamic Center, depot arsip, dan beberapa kantor. Jadi akan kami atur agar bisa lebih optimal, sekaligus mengurangi beban wilayah pusat dan barat kota," kata Wahyu.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, Shampton, mengungkapkan wacana pemecahan sebagian aktivitas madrasah ke sekitar

Islamic Center ini, sejatinya telah dibahas sejak era kepemimpinan Wali Kota Malang periode 2018-2023, Sutiaji.

"Ini sudah sempat dibahas dengan Wali Kota sebelumnya. Jadi layak dikaji ulang sekarang," katanya.

Shampton menambahkan, pengembangan kampus 2 ini juga berpotensi untuk memakmurkan kawasan Islamic Center, sekaligus membuka peluang tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. (Santi/Dya)

Prancis Bakal Akui Palestina, Israel 'Mendidih'

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengkritik pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut Paris mungkin akan mengakui negara Palestina paling lambat Juni. Saar menilai langkah tersebut sebagai bentuk "hadiah" bagi aksi terorisme.

"Pengakuan sepihak terhadap negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah untuk terorisme dan dorongan bagi Hamas," tulis Saar di media sosial X pada Rabu (9/4/2025) malam waktu setempat, dikutip dari AFP, Kamis (10/4/2025).

"Tindakan semacam ini tidak akan

membuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita semakin dekat tetapi sebaliknya: tindakan itu hanya akan semakin menjauhkannya," imbuhnya.

Saat ini hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan pengakuan negara Palestina, diikuti oleh Slovenia pada Juni. Langkah tersebut sebagian didorong oleh kecaman atas bombardir Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

Namun, Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina. Ini merupakan langkah yang telah lama ditentang Amerika Serikat, tetapi para pendukungnya melihat sebagai langkah yang diperlukan untuk membawa stabilitas ke kawasan tersebut.

Pada hari Rabu (9/4/2025) waktu setempat, Macron mengatakan Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, dan dapat melakukan langkah tersebut di konferensi PBB di New York pada

bulan Juni.

"Kami harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang," ujar Macron kepada televisi France 5.

Langkah tersebut juga akan menjadikan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui negara Palestina.

"Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak," imbuh pemimpin Prancis itu.

Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis "untuk bersikap jelas dalam perjuangan kami melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis yang merupakan kasus dengan Iran dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut," tandas Macron.

Diketahui bahwa Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. (AFP, Antara, Sputnik, ist/nei)

Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di depan bantuan kemanusiaan yang ditujukan ke Gaza, di gudang Bulan Sabit Merah Mesir di Arish, Mesir, 8 April 2025. (Reuters)

AS Keraahkan Pesawat Pengebom, Sinyal Keras Bagi Iran?

WASHINGTON DC - Dalam situasi yang semakin memanas dengan Iran, pemerintah Amerika Serikat mengirimkan beberapa pesawat pengebom B-2. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyatakan bahwa keputusan untuk menganggap langkah ini sebagai pesan bagi Teheran sepenuhnya berada di tangan Iran.

Sebanyak enam pesawat pengebom B-2 dikerahkan ke pangkalan militer AS-Inggris di pulau Diego Garcia di Samudra Hindia pada Maret lalu. Pengerahan ini dilakukan di tengah kampanye gempuran AS di Yaman dan meningkatnya ketegangan dengan Iran.

Hanya ada 20 pesawat pengebom B-2 dalam inventaris Angkatan Udara AS sehingga biasanya jarang digunakan. B-2 memiliki teknologi siluman dan dilengkapi untuk membawa bom dan senjata nuklir AS terberat.

Para ahli mengatakan bahwa pengerahan itu menempatkan B-2 dalam posisi ideal untuk beroperasi di Timur Tengah.

Ketika ditanya apakah B-2 tersebut dimaksudkan untuk mengirim pesan ke Iran, Hegseth berkata, "Kami akan

membiarkan mereka memutuskan."

"Ini aset yang hebat... ini mengirimkan pesan kepada semua orang," katanya kepada wartawan selama perjalanan ke Panama, Dikutip dari Reuters, Kamis (10/4/2025).

"Presiden Trump sudah jelas... Iran seharusnya tidak memiliki bom nuklir," katanya. "Kami sangat berharap - Presiden fokus untuk melakukan itu secara damai," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin lalu, bahwa Amerika Serikat dan Iran akan memulai pembicaraan langsung mengenai program nuklir Teheran pada hari Sabtu mendatang. Namun, Trump memperingatkan bahwa Iran akan berada dalam 'bahaya besar' jika pembicaraan itu gagal.

Pada hari Rabu (9/4/2025), Trump menegaskan kembali ancamannya untuk menggunakan kekuatan militer jika Iran tidak setuju untuk mengakhiri ambisi nuklirnya.

"Saya tidak meminta banyak... tetapi mereka tidak dapat memiliki senjata nuklir," kata Trump kepada wartawan. "Jika itu membutuhkan militer, kami akan menggunakan



Sebuah pesawat pengebom B-2 Spirit milik Angkatan Udara AS lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, 11 Januari 2018. (Reuters)

militer. Israel, jelas, akan menjadi... pemimpinnya. Tidak ada yang memimpin kami. Kami melakukan apa yang kami inginkan."

Ia menolak untuk membahas kapan serangan militer dapat dimulai.

Meskipun pesawat pengebom B-2 pernah digunakan untuk menyerang sasaran-sasaran Houthi di Yaman, sebagian besar pakar mengatakan penggunaan pesawat pengebom siluman itu berlebihan di sana.

Namun, B-2 dilengkapi untuk membawa GBU-57 Massive Ordnance Penetrator seberat

30.000 pon milik Amerika, yang dirancang untuk menghancurkan target jauh di bawah tanah. Itulah senjata yang menurut para ahli dapat digunakan untuk menyerang program nuklir Iran.

Negara-negara Barat menuduh Iran memiliki agenda rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir dengan memperkaya uranium hingga ke tingkat kemurnian fisil yang tinggi, di atas apa yang mereka katakan dapat dibenarkan untuk program energi atom sipil. (Reuters, ist/nei)

Patahkan Mitos!

Cabai Justru Baik untuk Ibu Hamil

PENELITIAN terbaru menunjukkan bahwa konsumsi cabai dalam jumlah tertentu selama kehamilan dapat membantu mencegah diabetes gestasional pada ibu hamil. Temuan ini bertentangan dengan anggapan umum bahwa ibu hamil sebaiknya menghindari makanan pedas, termasuk cabai. Wah, menarik, ya! Yuk, simak penjelasan lebih lengkapnya di bawah ini.

Penjelasan Kenapa Cabai Bisa Turunkan Risiko Diabetes Gestasional saat Hamil. Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu diabetes gestasional. Motherly melansir, diabetes gestasional (GDM) adalah kondisi yang memengaruhi cara tubuh memproses gula selama kehamilan.

Kondisi ini biasanya terdeteksi pada trimester kedua, dan meskipun umum dan sering kali bersifat sementara, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani—seperti berat badan lahir yang lebih tinggi atau perlunya kelahiran prematur. GDM juga dapat meningkatkan kemungkinan ibu yang melahirkan untuk mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka diabetes gestasional di AS telah meningkat—dari sekitar 6% pada tahun 2016 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2021. Pergeseran tersebut telah mendorong para peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana kebiasaan sehari-hari, seperti pola makan, dapat berperan dalam pencegahan.

Hubungan diabetes gestasional dengan cabai

Studi Universitas Buffalo yang diterbitkan dalam jurnal *Nutrients*, menganalisis data dari 1.397 wanita hamil di seluruh negeri. Para peneliti mengamati seberapa sering peserta mengonsumsi makanan berbahan dasar kacang-kacangan tertentu—termasuk kacang kering, sup kacang, dan cabai—dan apakah hal itu terkait dengan kemungkinan mereka terkena GDM.

Apa yang menonjol? Cabai.

Studi tersebut menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi cabai sekitar sebulan sekali memiliki tingkat diabetes gestasional yang jauh lebih rendah—3,5% dibandingkan dengan 7,4% pada orang yang tidak pernah mengonsumsi cabai. Menariknya, mengonsumsi cabai lebih sering tidak

menunjukkan manfaat yang sama. Para peneliti berpendapat bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam cara menyiapkan cabai—terutama karena beberapa resep mengandung banyak daging merah, yang dikaitkan dengan risiko GDM yang lebih tinggi.

Mengapa cabai bisa membantu?

Studi ini tidak mengidentifikasi bahan tunggal di balik kemungkinan manfaat tersebut, tetapi menawarkan beberapa teori yang didukung oleh sains:

Capsaicin

senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai, dapat membantu meningkatkan cara tubuh memproses gula. Meskipun diperlukan lebih banyak penelitian—terutama pada ibu hamil—beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa capsaicin dapat mendukung pengendalian glukosa darah yang lebih baik, meskipun bukti pada kehamilan khususnya masih terus bermunculan.

Kacang

yang sering digunakan sebagai bahan dasar cabai, kaya akan pati resistan dan senyawa fenolik, yang keduanya dikaitkan dengan peningkatan kontrol glikemik, yang berpotensi memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kacang yang lebih gelap seperti varietas hitam dan merah cenderung sangat kaya akan senyawa tanaman ini. Serat dari kacang-kacangan dan sayuran dalam cabai juga dapat membantu menstabilkan gula darah dan mendukung kesehatan usus—keduanya penting selama kehamilan. Moms, masukkan cabai sebulan

sekali ke dalam menu kehamilan Anda mungkin tidak hanya menambah rasa yang lezat tetapi juga dapat memberikan manfaat kesehatan potensial—terutama bila dibuat dengan bahan-bahan bergizi.

Meskipun temuan ini menjanjikan, temuan ini berasal dari studi observasional. Penelitian yang lebih luas diperlukan untuk menetapkan hubungan kausal yang pasti antara konsumsi cabai dan penurunan risiko GDM. Seperti biasa, jika Anda hamil dan berencana untuk mengubah pola makan, sebaiknya konsultasikan dengan ahlinya seperti bidan atau dokter kandungan Anda.

Cara lain mencegah diabetes gestasional untuk ibu hamil

Dilansir WebMD, ibu hamil dapat mengurangi risiko terkena diabetes gestasional dengan mengikuti beberapa langkah sederhana:

Tetap aktif

Targetnya adalah olahraga dengan intensitas sedang. Saat ibu hamil melakukan olahraga sedang, mereka mungkin merasakan detak jantung meningkat tetapi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Olahraga sedang secara teratur seperti berjalan, berenang, yoga, atau menari membantu menjaga kadar glukosa darah tetap seimbang.

Konsumsi makanan sehat

Sangat penting untuk mengonsumsi berbagai macam makanan untuk mendapatkan nutrisi yang baik. Ibu hamil tidak memerlukan banyak makanan tambahan saat hamil, tetapi memerlukan nutrisi yang baik agar bayi berkembang dengan baik.

Mengurangi makanan berlemak dan bergula tinggi membantu menjaga berat badan tetap sehat dan menurunkan risiko diabetes gestasional.
(nei,ist/dya)



Kawasaki Corleo, Kendaraan Mirip Robot Anjing

Kawasaki Heavy Industries meluncurkan inovasi terbaru di industri otomotif dengan memperkenalkan konsep kendaraan masa depan yang unik, yaitu Kawasaki Corleo.

Bukan mobil atau motor biasa, Corleo adalah robot berkaki empat dengan desain yang menyerupai hewan, menandai langkah baru dalam pengembangan teknologi kendaraan di Jepang.

Berdasarkan laman resminya, Kawasaki Corleo diklaim sebagai kendaraan biasa. Meski wujudnya tak lazim seperti motor pada umumnya, kendaraan ini mampu mengangkut dua penumpang sekaligus. Menariknya, robot ini dirancang untuk melibas beragam medan yang dilaluinya.

Bahkan, dari video yang dipublikasikan Kawasaki, Corleo bisa melewati jalan bebatuan, melewati genangan, bahkan akselerasinya bisa melompati cekungan yang cukup dalam.

Spesifikasi Kawasaki Corleo menggabungkan teknologi pengendalian stabilitas khas sepeda motor Kawasaki. Bedanya, pada bagian kaki-kaki menggunakan sistem dengan mekanik canggih yang membuatnya bisa bergerak secara lincah.

Tiap bagian kakinya bisa bergerak naik turun secara independen. Hasilnya, Corleo bisa meredam guncangan dengan sempurna ketika berjalan, berlari, dan melompat.

Menariknya, pada bagian telapak kaki Corleo juga dilengkapi lapisan karet yang mencegah selip. Sehingga

kendaraan futuristik ini bisa beradaptasi dengan berbagai kontur permukaan seperti padang rumput, bebatuan, ataupun medan bergelombang yang sulit dilalui oleh motor standar.

Kawasaki menjanjikan, berkendara di atas Corleo bakal memberikan sensasi berkendara yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Secara desain, bentuknya sangat futuristik, pabrikannya juga tak lupa membekalinya dengan beragam instrumen canggih. Mulai dari navigasi digital, posisi gravitasi, bahkan bisa memberikan penanda visual untuk menunjukkan kondisi jalan saat malam hari dan minim penerangan.

Kawasaki Corleo dibekali dengan mesin berdaya hidrogen dengan kubikasi 150 cc. Untuk suplai hidrogen, disimpan dalam tabung yang berada pada bagian belakang.

Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan dari sistem tersebut disalurkan ke masing-masing motor penggerak di keempat kakinya. Sehingga, Kawasaki menjadikannya kendaraan ramah lingkungan yang siap menjelajah ke mana saja.

Masa Depan Transportasi yang Lebih Adaptif

Kehadiran Kawasaki Corleo tidak dapat sekedar dipandang sebagai kendaraan yang aneh, melainkan sebuah ide yang dapat mengubah trend berkendara di masa yang akan

datang.

Dengan desain berkaki empat dan tenaga hidrogen, kendaraan ini menawarkan solusi inovatif untuk tantangan transportasi di medan yang sulit sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Meski Corleo sendiri masih dalam proses pengembangan, Corleo sendiri telah membuktikan

Kawasaki tidak ragu untuk menarik ide yang di luar kebiasaan.

Jika ide ini berhasil diwujudkan, bukan mustahil di masa yang akan datang kendaraan berkaki empat akan menjadi kendaraan favorit.

Bagi para penggemar otomotif dan teknologi, Kawasaki Corleo adalah bukti bahwa masa depan transportasi penuh dengan kemungkinan yang tak terduga. Siapkah Anda untuk "naik anjing" di tahun 2050? (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Surga Bawah Laut! Ini Spot Diving Terbaik Indonesia

INDONESIA memang terkenal dengan kekayaan lautnya, dengan sekitar 62% wilayahnya terdiri dari laut dan perairan. Keindahan bawah laut Indonesia tidak perlu diragukan lagi, dengan banyak spot scuba diving terbaik yang dapat ditemukan di berbagai kepulauan. Dari terumbu karang yang berwarna-warni hingga kehidupan laut yang beragam, Indonesia menawarkan pengalaman diving yang tak terlupakan.

Daya tariknya sudah dikenal luas di seluruh dunia, menjadikannya destinasi favorit bagi wisatawan internasional yang ingin menjelajahi keindahan bawah laut. Ada banyak lokasi menyelam yang tersebar di perairan Indonesia, yang membuatnya dikenal sebagai surga menyelam yang tak tertandingi di dunia.

Wisata bawah laut di Indonesia menjadi primadona dalam menarik minat para wisatawan asing yang menyukai aktivitas seperti snorkeling, freediving, dan scuba diving. Kali ini Traveloka akan memberikan rekomendasi spot scuba diving terbaik di Indonesia, yang wajib kamu kunjungi!

Tulamben, Bali

Destinasi spot scuba diving terbaik di Indonesia yang berada di utara Kabupaten Karangasem atau kawasan Bali timur (Tulamben) ini menyimpan pesona bawah laut yang mengagumkan. Jika menyelam hingga kedalaman sekitar 30 meter, kita juga bisa menemukan bangkai kapal US Liberty yang karam pada tahun 1942.

Kamu bisa menikmati scuba diving di Tulamben mulai dari kisaran harga Rp 500.000 hingga Rp 1,2 juta per orang, dengan sejumlah penyedia jasa diving di Tulamben yang bisa kita gunakan. Tetapi harga scuba diving tergantung pada paket yang dipilih, harga tersebut sudah termasuk tiket masuk, pendampingan dengan instruktur, peralatan diving, biaya porter, dan air mineral.

Gili Trawangan, Lombok

Pulau kecil yang terletak di

Lombok, Nusa Tenggara Barat, memiliki luas sekitar 338 hektar dan telah menjadi tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia. Gili Trawangan Lombok terkenal karena keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan, pantai berpasir putih yang mempesona, serta berbagai kegiatan menarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung.

Gili Trawangan dikenal dengan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Ada kesempatan untuk mengeksplorasi terumbu karang yang berwarna-warni dan melihat berbagai jenis biota laut yang mempesona dengan melakukan snorkeling atau menyelam.

Jangan sampai melewatkan peluang untuk berinteraksi dengan ikan eksotis, penyu, dan bahkan pari manta yang ukurannya besar di spot scuba diving terbaik di Indonesia ini. Kamu bisa menikmati keindahan lautnya hanya perlu menyiapkan budget mulai dari Rp.155.000/orang, akan disiapkan fasilitas yang siap untuk kalian gunakan untuk scuba diving maupun snorkeling.

Bunaken, Sulawesi

Taman Laut Bunaken telah dikenal luas sejak lama karena kecantikannya luar biasa di dasar lautnya. Terletak di wilayah yang dikenal sebagai "segitiga emas," di mana perairan ini menghubungkan laut Filipina, Laut Papua, dan Indonesia, Taman Laut Bunaken menampilkan ragam ekosistem bawah laut yang tak tertandingi.

Di antaranya, terdapat 390 jenis terumbu karang, 90 jenis ikan, serta beragam hewan laut lainnya yang menjadikannya rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang mengagumkan. Untuk bisa menikmati keindahan laut Bunaken lebih dalam dan lebih dekat kalian bisa mencoba scuba divingnya dengan kisaran harga yang bervariasi tergantung pada

tingkatannya. Untuk fun dive sekali, biayanya dibanderol mulai dari Rp 560 ribu, tetapi jika dua kali, harganya menjadi Rp 850 ribu. Selain itu, ada juga program sertifikasi dengan PADI. Harga sertifikasi bervariasi, seperti open water dive dengan harga mulai dari Rp 5.350.000, advance open water mulai dari Rp 4.650.000, emergency first response mulai dari Rp 2.260.000, dan dive master training mulai dari Rp 22 juta. Biaya yang sudah dijelaskan sudah termasuk alat selam, kapal, air mineral dan coffee break.

Raja Ampat, Papua

Raja Ampat sering dianggap sebagai destinasi bawah laut yang sangat diidamkan oleh banyak pelancong, termasuk mereka yang berasal dari luar negeri. Spot scuba diving terbaik di Indonesia ini menjadi tempat tinggal bagi sekitar 75% dari semua jenis karang di seluruh dunia.

Ada lebih dari 1.318 spesies ikan, 699 spesies moluska, dan 537 spesies terumbu karang yang beragam, sehingga pengalaman menyelam di Raja Ampat dijamin akan memberikan kepuasan bagi para pelancong. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk scuba diving di Raja Ampat kisaran 1,1jt-1,2jt, biaya tersebut sudah termasuk keseluruhan alat yang digunakan saat scuba diving

Kepulauan Derawan, Kalimantan

Terdiri lebih dari 31 gugusan pulau yang menakjubkan, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis biota laut yang menarik. Ini menjadikan Derawan sebagai salah satu destinasi menyelam paling terkenal di dunia yang terletak di Indonesia. Bagi penggemar aktivitas menyelam yang ingin menikmati keindahan bawah laut, tempat-tempat favorit untuk menyelam di area Derawan termasuk Pulau Maratua, Pulau Sangalaki, dan Pulau Kakaban

yang terkenal dengan keberadaan ubur-ubur non-sensasional.

Pulau Sirandah, Sumatra Barat

Pulau Sirandah Padang, sebuah destinasi indah di Padang, terletak sekitar 11 mil dari pusat kota. Dengan topografi yang berbukit dan diapit oleh pantai berpasir putih yang dikelilingi oleh pepohonan seperti kelapa dan lainnya, pulau ini menawarkan pemandangan yang memesona. Dibuka untuk umum sejak tahun 2017, pulau ini telah menjadi daya tarik bagi beragam wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Meskipun hanya memiliki luas 10 hektar, pesona alam spot scuba diving terbaik di Indonesia ini memukau dan memikat banyak pengunjung. (nei,ist/dya)



Taktik 'Pump and Dump' (dari Hal 1)

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menunda penerapan tarif resiprokal sejumlah negara, termasuk Indonesia, selama 90 hari ke depan.

Dilansir dari Reuters, Bendahara Negara menyambut baik jeda 90 hari tersebut karena menganggap hal itu merupakan kesempatan untuk membahas dan mencerna solusi terbaik, serta mengurangi risiko tarif terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Situasi terkini yang diperkirakan, sebelum jeda (penerapan tarif AS), dapat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi antara 0,3% hingga 0,5%, terhadap PDB (produk domestik bruto)," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters, di sela-sela pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN di Malaysia, dikutip Kamis (10/4/2025).

Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan menggunakan jeda 90 hari tersebut untuk menghasilkan kerangka kerja sama yang "saling dihormati" oleh negara-negara lain, serta bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan ketahanan kawasan tersebut.

"Kami harus terus bersikap sangat hati-hati. Belanja harus dibuat lebih efisien, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung pertumbuhan di sisi moneter," kata dia.

Ia mengatakan tekanan terkini terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang berada pada posisi terendah sepanjang masa, bersifat sementara, seraya menambahkan pemerintah tetap fokus pada indikator-indikator, seperti utang perusahaan dan rasio utang pemerintah terhadap PDB.

Dalam Sarasehan ekonomi, Sri Mulyani memaparkan pemerintah akan menjalankan langkah deregulasi perdagangan sebagai upaya dalam proses negosiasi tarif dengan AS. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain, meningkatkan volume impor AS, melakukan pemotongan pajak, menjalankan proses impor yang lebih mudah, dan melonggarkan persyaratan konten lokal.

Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan PDB sebesar 5,2% pada 2025, lebih tinggi dibanding realisasi pada 2024 lalu yang berada di level 5,03%. Namun, Presiden Prabowo Subianto berambisi mendorong pertumbuhan tersebut menjadi 8% pada 2029.

Pemerintah mengklaim tarif AS hanya memiliki dampak terbatas pada ekonomi nasional, yang lebih bergantung pada pasar domestik. AS merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia pada tahun lalu, dengan pengiriman senilai US\$26,3 miliar, menurut data pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dituduh melakukan manipulasi pasar secara

sejajanya menyusul keputusannya yang tiba-tiba untuk menunda tarif impor, hanya beberapa jam setelah mendorong pasar untuk jatuh.

Tuduhan ini dilontarkan oleh sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat, termasuk Senator Adam Schiff, yang meminta penyelidikan atas kemungkinan adanya perdagangan orang dalam (insider trading).

Melansir The Independent pada Kamis (10/4/2025), Trump pada pagi hari sempat mengunggah pernyataan di Truth Social yang berbunyi: "INI WAKTU YANG BAGUS UNTUK MEMBELI!!!" Tak lama setelah pembukaan bursa saham New York, Trump mengumumkan bahwa tarif atas impor dari sebagian besar negara akan ditangguhkan selama 90 hari, sementara tarif atas produk dari Tiongkok dinaikkan menjadi 125 persen.

Keputusan mendadak ini menyebabkan lonjakan tajam di pasar, setelah sebelumnya sempat jatuh akibat pemberlakuan tarif. Sejumlah analis dan politisi menilai langkah Trump sebagai strategi 'pump and dump' terbalik, yakni menjatuhkan harga saham lalu membeli sebelum harga naik kembali.

"Trump menciptakan fluktuasi

pasar yang sangat besar dengan kebijakan tarifnya yang berubah-ubah," ujar Schiff. "Guncangan kebijakan seperti ini membuka peluang berbahaya untuk insider trading. Siapa di dalam pemerintahan yang tahu tentang perubahan kebijakan tarif Trump sebelum diumumkan? Apakah ada yang membeli atau menjual saham dan meraup keuntungan dengan mengorbankan publik?"

Schiff menambahkan, "Saya akan menulis surat ke Gedung Putih – publik berhak tahu siapa yang sedang mengeruk keuntungan."

Ketika perwakilan dagang Trump, Jamieson Greer, ditanyai dalam sidang DPR mengenai apakah ia tahu sebelumnya soal perubahan kebijakan ini, ia menjawab, "Tidak."

Ketika ditanya lebih lanjut oleh anggota Kongres Steven Horsford mengapa hal tersebut tidak disebutkan dalam kesaksiannya, Greer menjawab, "Saya tidak mengungkapkan percakapan saya dengan presiden, Pak."

"Kalau ini adalah bagian dari rencana, bagaimana ini bukan manipulasi pasar?" desak Horsford.

"Ini bukan manipulasi pasar, Pak," jawab Greer. "Kami mencoba

mengatur ulang sistem perdagangan global yang telah memindahkan seluruh pabrik kita ke luar negeri."

"Siapa yang diuntungkan? Miliarder mana yang baru saja menjadi lebih kaya?" ujar Horsford yang kesal, seraya mengatakan bahwa tidak ada satu pun anggota DPR dari Partai Republik yang tersisa dalam sidang tersebut.

Ia menambahkan, "Siapa yang memimpin sebenarnya? Karena kelihatannya bukan perwakilan perdagangan. Anda baru saja kehilangan kendali. Ini bukan permainan. Ini kehidupan nyata."

Sementara itu, Trump menyatakan bahwa keputusannya menunda tarif muncul karena melihat pelaku pasar mulai "takut" dan bertindak di luar kendali.

"Saya pikir orang-orang agak berlebihan," ujar Trump. "Mereka mulai gelisah. Tapi ini berjalan mungkin lebih cepat dari yang saya bayangkan."

Trump juga menyatakan bahwa ia mengamati pasar obligasi, dan menyebut, "Pasar obligasi saat ini indah." Ia menambahkan, "Langkah besar bukanlah yang saya ambil hari ini. Langkah besar adalah yang saya lakukan di Hari Pembebasan." (wid, rtr, insider, ist, rls/dya)

Tak Hanya Perang Dagang, China-AS Panas di Terusan Panama

SETELAH bersitegang soal penerapan tarif impor, Amerika Serikat (AS) dan China saling tukar tanggapan keras soal Terusan Panama. Pihak AS menyatakan China adalah ancaman di terusan penting tersebut.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa terusan Panama menghadapi ancaman terus-menerus dari China namun bersama-sama Amerika Serikat dan Panama akan menjaga keamanannya.

Pernyataan Hegseth memicu tanggapan berapi-api dari pemerintah China, yang mengatakan: "Siapa yang mewakili ancaman sebenarnya terhadap Terusan? Masyarakat akan membuat penilaian sendiri."

Berbicara pada pemotongan pita untuk dermaga baru yang dibiayai AS di Pangkalan Angkatan Laut Vasco Nuñez de Balboa setelah pertemuan dengan presiden Panama, José Raúl Mulino, Hegseth mengatakan AS tidak akan membiarkan China atau negara lain mengancam operasi terusan tersebut.

"Untuk mencapai tujuan ini, Amerika Serikat dan Panama telah berbuat lebih banyak dalam beberapa minggu terakhir untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dibandingkan yang telah kita lakukan dalam beberapa dekade terakhir," katanya dilansir the Guardian, Kamis (10/4/2025).

Hegseth menyinggung pelabuhan di kedua ujung kanal yang dikendalikan oleh konsorsium Hong

Kong, yang sedang dalam proses menjual saham pengendalinya ke konsorsium lain termasuk BlackRock Inc.

"Perusahaan yang berbasis di China terus mengendalikan infrastruktur penting di wilayah kanal," kata Hegseth. "Hal ini memberi Tiongkok potensi untuk melakukan aktivitas pengawasan di seluruh Panama. Hal ini membuat Panama dan Amerika Serikat menjadi kurang aman, kurang sejahtera, dan kurang berdaulat. Dan seperti yang telah ditekankan oleh Presiden Donald Trump, situasi tersebut tidak dapat diterima."

Hegseth bertemu dengan Mulino selama dua jam pada Selasa (8/4/2025) pagi sebelum menuju ke pangkalan angkatan laut yang sebelumnya merupakan stasiun angkatan laut Rodman AS.

Dalam perjalanan, Hegseth memposting foto kedua pria itu di Twitter/X sambil tertawa dan mengatakan merupakan suatu kehormatan berbicara dengan Mulino. "Kerja keras Anda dan negara Anda membuat perbedaan. Peningkatan kerja sama keamanan akan membuat kedua negara kita lebih aman, kuat, dan sejahtera," tulisnya.

Kunjungan ini terjadi di tengah ketegangan atas pernyataan Donald Trump yang berulang kali menyatakan bahwa AS dikenakan biaya berlebihan untuk menggunakan terusan Panama dan bahwa China memiliki pengaruh atas operasinya – tuduhan yang dibantah oleh Panama.

Tak lama setelah pertemuan tersebut, kedutaan besar China di Panama mengecam pemerintah AS dalam sebuah pernyataan mengenai X, dengan mengatakan bahwa AS telah menggunakan "pemerasan" untuk memajukan kepentingannya sendiri dan bahwa dengan siapa Panama melakukan bisnis adalah "keputusan kedaulatan Panama... dan AS tidak mempunyai hak untuk ikut campur".

"AS telah melakukan kampanye sensasional tentang 'ancaman teoretis Tiongkok' dalam upaya untuk menyabotase kerja sama China-Panama, yang semuanya berakar pada kepentingan geopolitik Amerika Serikat," tulis kedutaan tersebut.

Namun konsorsium Hong Kong telah mengumumkan bahwa CK Hutchison akan menjual saham pengendalinya di pelabuhan tersebut kepada konsorsium termasuk BlackRock Inc, yang pada dasarnya menempatkan pelabuhan tersebut di bawah kendali AS setelah penjualan selesai.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada Mulino saat berkunjung pada bulan Februari bahwa Trump yakin kehadiran China di wilayah terusan mungkin melanggar perjanjian yang menyebabkan Amerika menyerahkan jalur air tersebut ke Panama pada tahun 1999. Perjanjian tersebut menyerukan netralitas permanen atas terusan yang dibangun oleh Amerika. (rep, wid, guardian, ist/dya)



DPRD dan Pemkot Sepakati Ranwal RPJMD Surabaya 2025-2029

Fokus Transformasi Menuju Kota Berkelanjutan

SURABAYA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menyetujui Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen Ranwal RPJMD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya pada Rabu (9/4/2025).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, serta Wakil Ketua DPRD. Ranwal RPJMD ini akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan Surabaya selama lima tahun ke depan.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan bahwa pembahasan Ranwal RPJMD Surabaya 2025-2029 telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

"Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kepala daerah wajib mengajukan Ranwal RPJMD paling lambat 40 hari setelah dilantik," terang Adi.

Adi juga menjelaskan bahwa pembahasan Ranwal RPJMD telah dilakukan dalam rapat konsultasi antara DPRD dan Pemkot Surabaya pada 8 April 2025. Kemudian ditindaklanjuti melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) di hari yang sama.

"Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkot Surabaya," katanya.

Adi menuturkan, jika pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, transportasi, masalah ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan gedung akan jadi prioritas penting yang akan dibahas dalam RPJMD.

"Termasuk masalah parkir. Ini akan dikupas seluruh persoalan dalam Pansus yang membahas Raperda RPJMD," tuturnya.

Politisi dari PDI Perjuangan ini mengungkapkan, jika DPRD juga memberikan sejumlah masukan penting, terutama terkait ketepatan waktu penyusunan RPJMD agar tidak melampaui batas enam bulan sejak pelantikan Wali Kota.



Penandatanganan dokumen Ranwal RPJMD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya pada Rabu (9/4/2025) oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, serta Wakil Ketua DPRD. (Istimewa)

Selain itu, isu-isu strategis mulai dibahas, seperti pembangunan infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pendidikan.

Ia menyebut, jika isu-isu itu merupakan usulan yang disampaikan masyarakat terkait infrastruktur jalan, penanganan banjir, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pembangunan sekolah.

"Kita menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait kondisi jalan, banjir, hingga pelayanan rumah sakit. Ini tentu akan menjadi bahan pembahasan dalam substansi RPJMD nanti," sebutnya.

Sementara terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD mendorong Pemkot agar lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan lokal yang saat ini cenderung lesu.

DPRD juga menekankan pentingnya program padat karya untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Nanti akan kita lihat, yang pasti itu juga akan jadi konsen DPRD Surabaya terkait padat karya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat," tambahnya.

Terkait timeline, Adi mengatakan, jika DPRD Surabaya telah menyetujui pada bulan Agustus untuk penyelesaiannya. "Kami sepakati sekitar bulan Agustus sehingga kita bisa memiliki Raperda RPJMD 2025-2029. Dimana nantinya, itu akan dijadikan acuan arah pembangunan Kota Surabaya," tukasnya.

Senada, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, "RPJMD ini menentukan misi kita ke depan, karena visi kita adalah transformasi Surabaya menuju

kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan."

Ia menjelaskan bahwa seluruh misi dan program strategis sudah dijabarkan secara rinci dalam dokumen RPJMD tersebut. Di antaranya meliputi pembentukan karakter masyarakat, penguatan ekonomi berkelanjutan, hingga perencanaan kegiatan konkret tiap tahun selama periode 2025-2029.

"Misalnya target ekonomi di tahun 2026 berapa, 2027 seperti apa, dan seterusnya. Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan, semua sudah terukur dan disepakati," jelasnya.

Selain itu, Eri menuturkan bahwa RPJMD juga mencakup seluruh sektor penting, termasuk infrastruktur dan pendidikan. Ia menyebut, pembangunan infrastruktur akan terus digenot, salah satunya melalui proyek diversifikasi Gunungsari, pembangunan Jalan Menganti-Wiyung menuju Gresik, hingga pembangunan rumah sakit untuk masyarakat miskin.

"Termasuk ada (pembangunan) jembatan, biar tidak membebani posisi di Jalan Karangpilang. Jadi banyak hal yang kita lakukan dan itu yang akan kita jadikan dalam waktu lima tahun ke depan," tuturnya.

Pendidikan hingga Transportasi Massal

Untuk sektor pendidikan, Cak Eri menekankan pentingnya pemerataan dan kesetaraan akses. Oleh sebabnya, dalam RPJMD juga disepakati terkait jumlah sekolah atau rombongan belajar (Rombel) agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. "Karena selalu saya katakan, kesetaraan pendidikan ini

merupakan tugas DPRD dan pemerintah kota," imbuhnya.

Mengenai pembiayaan, Eri membeberkan bahwa Kota Surabaya memiliki kekuatan fiskal yang mandiri. Karena itu, pendanaan berbagai program atau kegiatan tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, melainkan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Alhamdulillah pemerintah kota dan DPRD Surabaya tidak tergantung dari pemerintah pusat, tapi dari PAD. Karena salah satu kota yang terkuat fiskalnya itu adalah Surabaya, dan kita sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Di samping itu, Eri menyampaikan bahwa pengembangan transportasi massal juga masuk dalam RPJMD. Ia menyinggung rencana pengoperasian jalur rel ganda (double track) pada tahun 2027, yang akan terkoneksi dengan layanan transportasi antarkota seperti Sidoarjo dan Gresik. "Sehingga nanti kita akan mengkoneksikan dengan Wira Wiri yang ada di tempat kita," paparnya. (adv, ama/dya)



Kita menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait kondisi jalan, banjir, hingga pelayanan rumah sakit. Ini tentu akan menjadi bahan pembahasan dalam substansi RPJMD nanti."

ADI SUTARWIJONO
Ketua DPRD
Kota Surabaya